



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Telpon (0536) 3231542/Fax. (0536) 3231539
E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id/Website : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 266.1/Set/Bapplitbang/II/2023

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 17), sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 02

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas karena atas perkenan-Nya telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022. Pembuatan LKIP merupakan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Laporan LKIP ini memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas dan semakin memacu kinerja di masa yang akan datang, selanjutnya diharapkan sebagai acuan penyempurnaan laporan kinerja pada tahun berikutnya.

Palangka Raya, 26 Januari 2023

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selama Tahun 2022, Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar 18.049.118.382 realisasi sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.131.633.783 yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 16 Kegiatan.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018- 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui sasaran strategis Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah realisasi sebesar 100%.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD realisasi sebesar 100%.
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah sebesar 100%.
4. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbang realisasi sebesar 100%.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan realisasi sebesar 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator, pencapaian sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai sebesar 100% dan nilai realisasi anggaran sebesar 94,92%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	14
1.4. Sarana dan Prasarana	14
1.5. Isu Strategis	15
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Perencanaan Strategis.....	19
2.2. Indikator Kinerja Utama	21
2.3. Perjanjian Kinerja	22
2.4. Rencana Aksi	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2022	38
3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	39
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	40
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Bappedalitbang Kota Palangka Raya	42
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada) Tahun 2022	43
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	44
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
3.2. Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun melalui rangkaian proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan publik, kemampuan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah serta dokumen sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya.

Penyusunan LKIP Tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah yang didanai dari APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja sehingga LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a. Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan agar mencapai hasil yang optimal;

- c. Menetapkan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan Program dan kegiatan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menyelenggarakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimbangan, serta arah disposisi yang baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. Menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- h. Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Badan

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- c. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Mengkoordinir dan memberi dukungan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- f. Merumuskan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPPD), Penetapan Kinerja, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan tindak lanjut LHE-LHP Inspektorat dan pengawasan lainnya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;
- i. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Penulisan untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- f. Menyusun laporan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- h. Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyusun program kerja kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- c. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun dan memproses administrasi kepegawaian Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) bagi pelaksana, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, surat ijin, administrasi daftar diklat perjenjangan dan fungsional PNS, merekap daftar hadir PNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- e. Menyusun dan memproses administrasi umum meliputi pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan ditandatangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- f. Menyusun dan memproses administrasi perlengkapan meliputi pembuatan usulan-usulan/mengadakan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- g. Menyusun pengaturan tata ruang kantor, memelihara, menjaga kebersihan, dan ketertiban serta keamanan di lingkungan Bappedalitbang Kota Palangka Raya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta kebersihan, kenyamanan dan keindahan di Lingkungan Bappedalitbang Kota Palangka Raya;
- h. Menyusun dan memproses administrasi mutasi PNS antara instansi dan daerah bagi jabatan pelaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);

- f. Menerima dan memeriksa hasil analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya;
- g. Merumuskan dan menyelia program-program pembangunan pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di daerah serta penyelarasan program pembangunan di daerah dengan program pembangunan/prioritas pembangunan provinsi dan pemerintah pusat;
- h. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. Mengidentifikasi masalah pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. Memeriksa dan menyelia hasil serta proses pengumpulan data Informasi Pembangunan Daerah;
- n. Menyelia dan mensosialisasikan penyampaian serta pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. Memeriksa hasil penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- p. Menyelia dan mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- q. Memeriksa dan menyelia hasil analisis evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- r. Memeriksa dan menyelia hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program Pembangunan Daerah;
- s. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. Merancang pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- h. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di dan kabupaten/kota;
- j. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- l. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- m. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

- n. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

7. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- h. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;

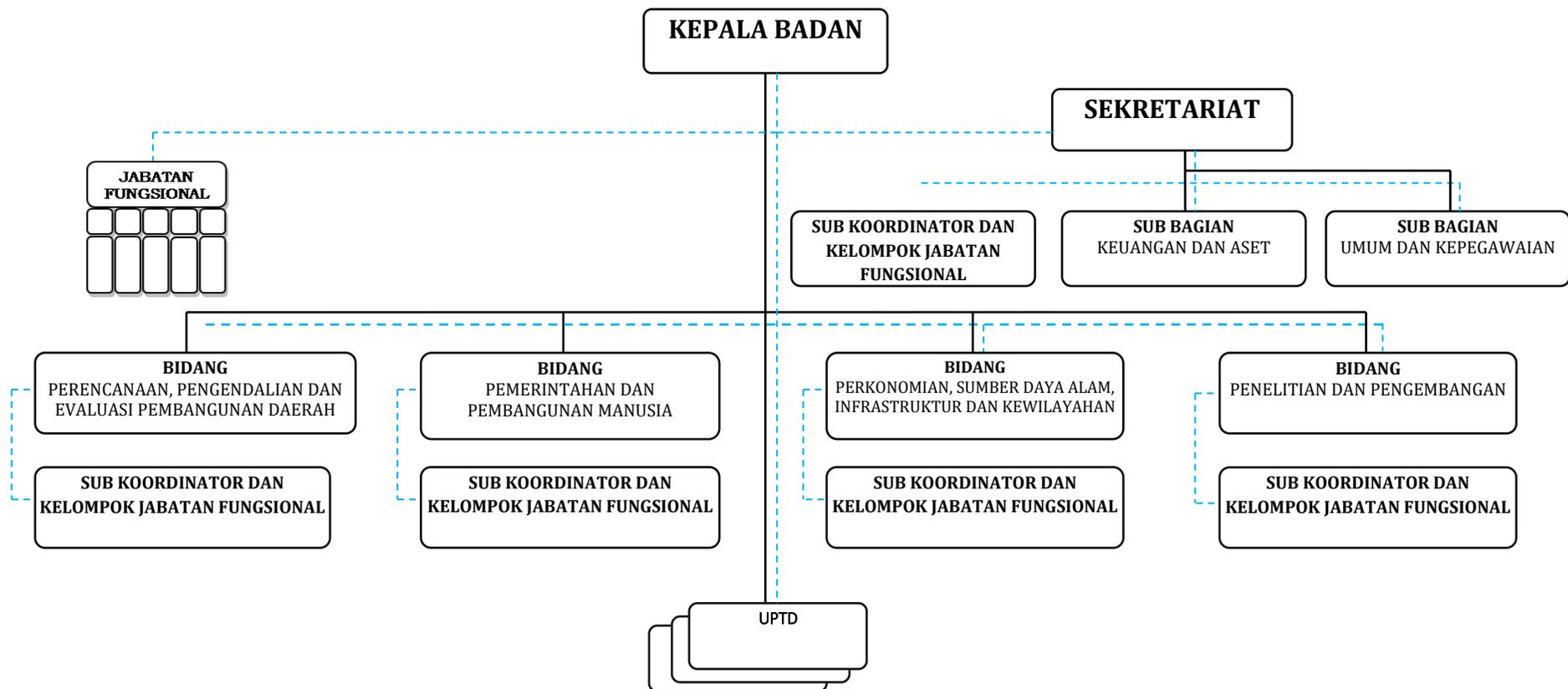
- i. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di dan kabupaten/kota;
- k. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- m. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- n. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Menyusun kebijakan teknis atau kerangka acuan kerja Penelitian dan Pengembangan;
- e. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi bahan terkait proposal Penelitian dan Pengembangan;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Melaksanakan seminar awal dan seminar akhir kegiatan penelitian dan pengembangan;

- i. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup penelitian dan pengembangan;
- j. Memantau pengelolaan data kelitbangan, peraturan dan pelaksanaan pengkajian peraturan, serta koordinasi dan pelaksanaan diseminasi kelitbangan;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- l. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m. Mengkoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- n. Monitoring atas pemberian rekomendasi izin penelitian bagi peneliti dalam negeri dan peneliti luar negeri;
- o. Melaksanakan penataan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan di bidang penelitian dan pengembangan;
- p. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- q. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDALITBANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022



1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 47 orang.

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S-3 sebanyak 2 (satu) orang
 - b. Pendidikan S-2 sebanyak 10 (sepuluh) orang
 - c. Pendidikan S-1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - d. Pendidikan D-III sebanyak 3 (tiga) orang
 - e. Pendidikan SLTA sebanyak 2 (dua) orang
2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
 - a. Struktural
 - 1) Eselon II.b : 1 orang
 - 2) Eselon III.a : 1 orang
 - 3) Eselon III.b : 4 orang
 - 4) Eselon IV.a : 2 orang
 - b. Pelaksana : 25 orang
 - c. Pejabat Fungsional : 14 orang
3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang
 - c. Pembina (IV/a) : 5 orang
 - d. Penata Tingkat I (III/d) : 19 orang
 - e. Penata (III/c) : 5 orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 2 orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 11 orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
 - i. Pengatur (II/c) : 1 orang

1.4. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya memiliki sarana prasarana sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu :

1. Gedung Kantor	: 1 unit
2. Mobil Dinas	: 9 unit
3. Motor Dinas	: 7 unit
4. Komputer PC	: 52 unit
5. Lap Top	: 38 unit
6. Note Book	: 72 unit
7. Printer	: 59 unit
8. Scanner	: 4 unit
9. Harddisk Eksternal	: 60 unit
10. Mesik Ketik	: 13 unit
11. Lemari Besi	: 9 unit
12. Filling Besi	: 57 unit
13. Lemari Kaca	: 15 unit
14. Lemari Kayu	: 6 unit
15. Rak Kayu	: 17 unit
16. Meja Rapat	: 31 unit
17. Meja Tulis	: 66 unit
18. Meja Biro	: 19 unit
19. Kursi Rapat	: 170 unit
20. Kursi Tangan	: 53 unit
21. Kursi Biasa	: 21 unit
22. AC	: 75 unit
23. Televisi	: 15 unit
24. Loudspeaker	: 9 unit
25. Unit Power Supply	: 18 unit
26. CCTV	: 15 titik

1.5. Isu strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya. Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan Kelitbang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan

yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan yang berkualitas, ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu : Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

- a. Perencanaan pembangunan daerah belum konsisten sehingga perlu meminimalisasi deviasi yang terjadi;
- b. Kurangnya ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya, data sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya;
- c. Belum optimalnya monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh proses perencanaan dan hasil pelaksanaan perencanaan;
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan inovasi daerah;
- e. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global;
- f. Masih perlunya peningkatan kapasitas aparatur perencana pembangunan dan kelitbangan;
- g. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan anggaran.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyusunan LKIP Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Sumber Daya Manusia
- 1.4. Sarana dan Prasarana
- 1.5. Isu Strategis
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Perjanjian Kinerja
- 2.4. Rencana Aksi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2022
 - 3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
 - 3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

- 3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Bappedalitbang Kota Palangka Raya
- 3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada) Tahun 2022
- 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
- 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sebagai konsekuensi dari adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan target capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk Tahun 2018-2023.

A. Visi

Visi Bappedalitbang sesuai dengan Visi Kepala Daerah yang terpilih periode RPJMD Tahun 2018-2023

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”

B. Misi

Upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

“Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)”

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Bappedalitbang Kota Palangka Raya yaitu :
“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah”

Sasaran Bappedalitbang Kota Palangka Raya yaitu :

- 1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Daerah**
- 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan OPD**
- 3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah**
- 4. Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan**

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya strategi yang ditempuh adalah :

“Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik dan Efektivitas”

Didukung dengan 3 program prioritas dan 1 program penunjang yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Arah kebijakan Tahun 2022 sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

“Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakkan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas”

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan capaian **60,30** dengan kategori **B** serta telah menetapkan SK IKU Nomor 21.1/Set/Bapplitbang/I/2022 Tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya

SASARAN	IKU	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	85%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Tahun 2018-2023
	Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA			
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	85%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Tahun 2018-2023
Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target (mengawal target Perjanjian Kinerja Walikota/ Daerah)	85%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Tahun 2018-2023
Meningkatnya kualitas hasil kelibangan	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%	Bappedalitbang	Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD Yang Selaras Dengan RPJMD	85%
		Persentase RENJA Yang Selaras Dengan RENSTRA	
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD Yang Memiliki Perencanaan Baik	85%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Yang Sesuai Atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/Daerah)	85%
4.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang Yang Termanfaatkan	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti	BB dan 1 TL

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.329.788.542	DAU
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.404.851.219	DAU
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.334.478.621	DAU
4.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 680.000.000	DAU
Total Anggaran		Rp. 15.749.118.382	

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	85%
		Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA	
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	85%

3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/Daerah)	85%
4.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti	BB dan 1 TL

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.227.988.543	DAU
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	2.487.651.218	DAU
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	3.853.478.621	DAU
4.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	1.480.000.000	DAU
	Total Anggaran	Rp.	18.049.118.382	

2.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi untuk mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya membuat Rencana Aksi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	85%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.404.851.219										Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah
					1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.200.413.468								
		Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	523.953.250	Melaksanakan rapat koordinasi dan survei lapangan	2 Dokumen	1	1	0	0		
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	166.501.063	Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi	6 Dokumen	0	0	0	6		
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	509.959.155	Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi	3 Dokumen	1	0	2	0		

						2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	662.686.000									Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	421.621.750	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan data perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	1	0	1	1			
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	241.064.250	Melaksanakan pelatihan dan rapat koordinasi	66 Orang	0	0	33	33			
2	Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target (mengawal target Perjanjian Kinerja Walikota/ Daerah)	85%			3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	541.751.751									Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	163.412.063	Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah	8 Laporan	2	2	2	2			

							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	378.339.688	Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke OPD Kota P. Raya	15 Laporan	4	4	4	3	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	85%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.334.478.621										
						1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.527.426.495						Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	569.944.125	Menyusun dokumen survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Walikota dan dokumen rencana detail pengembangan pariwisata Kota Palangka Raya	2 Dokumen	0	0	0	2	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	88.103.750	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan	7 Laporan	1	2	2	2	

						<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p>	130.689.062	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Mitra Bappedalitbang</p>	1 Laporan	0	0	0	1	
						<p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</p>	298.689.558	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan</p>	7 Laporan	0	0	0	7	
						<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	275.000.000	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia</p>	2 Dokumen	0	0	1	1	
						<p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>	165.000.000	<p>Melaksanakan rapat koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia</p>	4 Laporan	1	1	1	1	
					2	<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p>	455.426.813							<p>Kabid Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan</p>

							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.107.250	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	2 Dokumen	0	0	1	1	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	242.746.000	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian	2 Laporan	0	0	1	1	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.483.750	Melaksanakan monev dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5 Laporan	0	1	2	2	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.589.813	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	2 Dokumen	0	0	1	1	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	53.500.000	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDA	2 Laporan	0	0	1	1	

						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000	Melaksanakan monev dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	2 Laporan	0	0	1	1	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	85%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.351.625.313								Kabid Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	74.221.875	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	2 Dokumen	0	0	1	1		
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	431.033.750	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur	2 Laporan	0	0	1	1	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.620.000	Melaksanakan peninjauan lapangan terhadap perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur	2 Laporan	0	0	1	1	

							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.000.000	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	3 Dokumen	0	0	0	3	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	695.000.000	Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan	3 Laporan	0	0	0	3	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.749.688	Melaksanakan peninjauan lapangan terhadap perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan	3 Laporan	0	0	0	3	
4	Meningkatnya kualitas hasil kelitbang	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	680.000.000	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	105.000.000							Kabid Litbang
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	105.000.000	Melaksanakan penelitian/kajian Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	0	0	0	1	

						2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	105.000.000		1 Dokumen						Kabid Litbang
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	105.000.000	Melaksanakan penelitian/kajian Bidang Aspek Sosial	1 Dokumen	0	0	0	1		
						3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	210.000.000		2 Dokumen						Kabid Litbang
							Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	105.000.000	Melaksanakan penelitian/kajian Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	0	0	1		
							Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	105.000.000	Melaksanakan penelitian/kajian Bidang Perhubungan	1 Dokumen	0	0	0	1		
						4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	260.000.000		5 Dokumen						Kabid Litbang
							Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi	105.000.000	Melaksanakan penelitian/kajian di Bidang Teknologi dan Informasi	1 Dokumen	0	0	0	1		

							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	50.000.000	Memfasilitasi penginputan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengikuti <i>Innovative Government Award</i>	1 Laporan	0	0	0	1	
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	105.000.000	Melaksanakan Lomba Inovasi Daerah Kota Palangka Raya serta Menerbitkan Buletin Litbang	3 Laporan	0	0	1	2	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.329.788.542										
						1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.389.001	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Sekretaris
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.252.188	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	3	4	3	3	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.364.000	Melaksanakan koordinasi dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	9	9	9	8	

							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.772.813	Menyusun Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1	0	0	0	
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.574.246.371	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Sekretaris
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.426.646.371	Menyusun dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen	0	1	0	1	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.091.850.000	Menyusun Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3	3	3	3	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.375.000	Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3	0	0	0	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	45.375.000	Menyusun Laporan Keuangan Triwulan SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	
						3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.030.000							Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	Menyediakan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1	0	0	0	

							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.030.000	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	22 Orang	4	6	6	6	
						4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	774.500.648	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						Sekretaris
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.376.250	Menyediakan Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	1	1	1	1	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	485.820.688	Menyediakan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	2	3	0	0	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.998.750	Menyediakan Paket Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	3	3	3	3	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.026.955	Menyediakan Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	3	3	3	3	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	Menyediakan Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Paket	0	1	1	0	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.278.005	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	

						5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.156.034	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Sekretaris
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	Menyediakan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1	1	1	1		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.754.377	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3	3	3	3		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.401.657	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3	3	3	3		
						6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.466.488	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan							Sekretaris
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.426.400	Menyediakan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit	4	4	4	4		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.650.000	Menyediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	5	5	5	5		

							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.290.088	Menyediakan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	0,2 5	0,2 5	0,2 5	0,2 5	
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.100.000	Menyediakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0	2	1	0	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2022

Hasil pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

(2) Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara target kinerja dan capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA	85%	85%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	85%	85%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/Daerah)	85%	85%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti	BB dan 1 TL	BB dan 1 TL	100%

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Daerah dengan indikator sasaran Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD dan Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA terealisasi sebesar 100% sesuai target. Sasaran tersebut diperoleh dari Jumlah Program/Kegiatan RKPD dibagi Jumlah

Program/Kegiatan RPJMD x 100% serta Jumlah Program/ Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/Kegiatan RENSTRA x 100%.

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD dengan indikator sasaran Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik terealisasi sebesar 100% sesuai target. Sasaran tersebut diperoleh dari Jumlah Program/ Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/ Kegiatan DPA x 100%.
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah dengan indikator sasaran Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target terealisasi sebesar 100% sesuai target. Sasaran tersebut diperoleh dari Capaian (Realisasi) Program/Kegiatan Perangkat Daerah dibagi Target Program/Kegiatan Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dengan indikator sasaran Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan terealisasi sebesar 100% sesuai target. Sasaran tersebut diperoleh dari Jumlah kajian yang diterapkan oleh perangkat teknis / Jumlah kajian yang dilaksanakan.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan terealisasi sebesar 100% sesuai target.

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1.	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	-	-
2.	Terwujudnya Pemanfaatan Penelitian untuk Perencanaan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	100%	-	-

3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	-	100%	-
		Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	-	100%	100%
4.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	-	-	100%
		Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA	-	-	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	-	-	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/ Daerah)	-	-	100%
7.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbang	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	-	-	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya bersama Perangkat Daerah berhasil melakukan fungsi koordinasi sebagai akibat penyesuaian tujuan, sasaran, program kerja beserta seluruh indikatornya selain adanya pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan yang berjalan secara optimal dan memberikan dampak baik bagi perencanaan pembangunan demi pencapaian sasaran daerah dan perwujudan visi misi Kepala Daerah, sehingga capaian kinerja Tahun 2022 termasuk kategori berhasil perbandingannya sama dengan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, dengan pencapaian realisasi 100%.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagai berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD/ Renstra 2023	Realisasi 2022	Persentase Realisasi Terhadap Target RPJMD/Renstra
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	90%	85%	94,44%
		Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA			
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	90%	85%	94,44%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/ Daerah)	90%	85%	94,44%

4.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti	BB dan 1 TL	BB dan 1 TL	100%

Dari tabel di atas sasaran meningkatnya kualitas perencanaan daerah dengan dua indikator untuk tahun keempat RPJMD telah mencapai realisasi sesuai target yang direncanakan. Hal ini menjadi kesuksesan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada) Tahun 2022

Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan			Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Realisasi
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	85%
				Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA	

Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	88% - 91,9%	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target	85%
---	---	-------------	---	---	-----

Berdasarkan tabel di atas realisasi kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya bila dibandingkan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan yaitu :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah untuk capaian realisasi telah sesuai dengan target dari Kementerian Perencanaan Pembangunan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah untuk capaian realisasi masih kurang 3% di bawah target dari Kementerian Perencanaan Pembangunan.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam kategori berhasil karena persentase capaian 100%. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ini disebabkan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi. Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja Tahun 2022 ini, terdapat beberapa penyebab keberhasilan sehingga mencapai realisasi 100% berdasarkan data lampiran sebagai berikut :

- a. Optimalnya koordinasi oleh Perangkat Daerah dengan Bappedalitbang Kota Palangka Raya selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah;

- b. Optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan dan penganggaran;
- c. Adanya komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dimaksud sehingga mampu menetapkan prioritas program yang harus dilaksanakan;
- d. Optimalnya peran Bappedalitbang dalam melaksanakan koordinasi, monitoring/evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- e. Optimalnya pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan.

Terkait solusi yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui Bidang-Bidang sudah mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan maupun aplikasi monitoring evaluasi.

KINERJA BIDANG YANG Mendukung Indikator Kinerja Utama

1. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu :

- b. Penginputan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah



1. FORM 1 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RPKD Perubahan Form 1.pdf - Miro Pri 10

REKAPITULASI JMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PANG/PAK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2022

No	Uraian	Jumlah Program		Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Kegiatan		Jumlah Anggaran		Jumlah Anggaran		Kategori Anggaran	Kategori Anggaran
		RKPD 2021	RKPD 2022	RKPD 2021	RKPD 2022	RKPD 2021	RKPD 2022	RKPD 2021	RKPD 2022	RKPD 2021	RKPD 2022		
1	1. JALAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN	3	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	2. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	11	11	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4	4. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	1	1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
5	5. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	8. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
11	11. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
12	12. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
13	13. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
14	14. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
16	16. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
17	17. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
18	18. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
19	19. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
20	20. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
21	21. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
22	22. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
23	23. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
24	24. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
25	25. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
26	26. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
27	27. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
28	28. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
29	29. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
30	30. JALAN PERUBAHAN DAERAH PERUBAHAN	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

c. Tersusunnya dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah



d. Pendampingan Perangkat Daerah Penginputan Uji Coba Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah



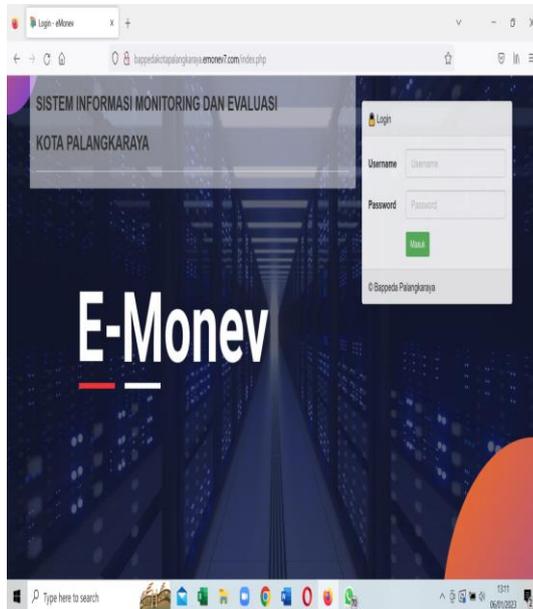
e. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Satu Data



f. Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- Desk Perangkat Daerah Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap Triwulan Tahun 2022

- Kegiatan yang dilaksanakan berupa Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya setiap Triwulan Tahun 2022



2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

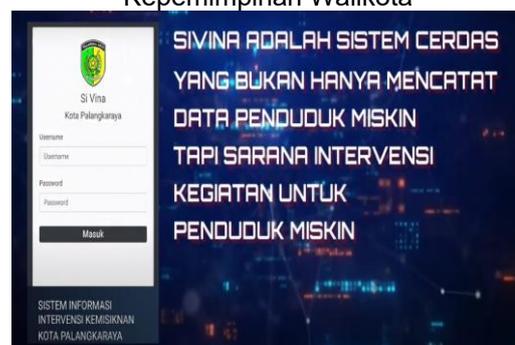
Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu :

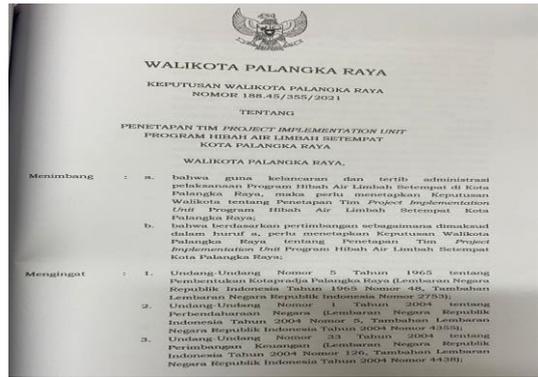


Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata



Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Walikota





Data Baseline Kumuh di Kota Palangka Raya
<https://sites.google.com/view/datainfrastrukturpalangkaraya/baseline-kumuh>

SK Tim Project Implementation Unit Hibah Air Limbah Setempat



Dokumen JAKSTRADA SPAM

Dokumen RPPLH

b. Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Perangkat Daerah



Rapat Tindak Lanjut Penanganan WTP pada Kegiatan Skala Kawasan



Rapat Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota



Rapat Permasalahan Sambungan Jaringan Listrik pada Pembangunan TPS3R



Rapat Data Kolaborasi Penanganan Kumuh



Rapat Koordinasi dan Asistensi Penyusunan JAKSTRADA SPAM Kota Palangka Raya



Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Kuliner Dermaga Rambang

c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi



Survey Bantuan Bedah Rumah



Identifikasi sebelum dilakukannya penyerahan aset oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota



Identifikasi Kawasan Tematik Terintegrasi



Monitoring dan Evaluasi DAK Perumahan



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan HALS



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan HALS



Monitoring Bantuan Bedah Rumah

d. Kegiatan CSR/Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Kota Palangka Raya

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan adalah kewajiban yang melekat bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kota Palangka Raya untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif.



Tampilan Website Forum CSR Online



Susunan Keanggotaan Forum TJSLP



Bantuan CSR PLN Peduli Berupa Kendaraan Angkutan Roda Tiga Viar dan Molisa



Bantuan CSR PT. Mapa Perahu untuk SMP Satu Atap 7 Danau Tundai



Kegiatan Rapat Evaluasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)



Laporan CSR Tahun 2022

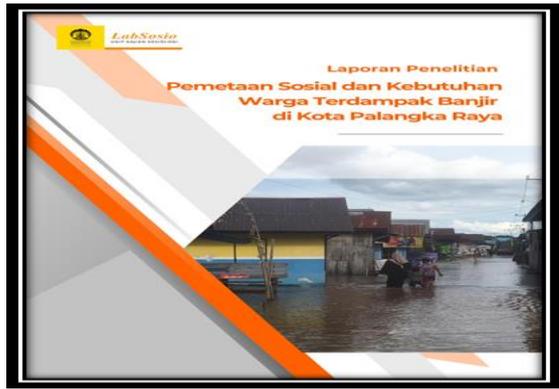
4. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu :

- a. Focus Group Discussion (FGD), Seminar dan Rapat Koordinasi



b. Laporan Kajian, Buletin Litbang dan Lomba Inovasi



3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2022 atas Aspek Implementasi yaitu :

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi

a. Capaian Output

1) Capaian RO Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CRO = \left[\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right]^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO_i

TVRO_i : target volume RO_i

m : jumlah RO

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh perhitungan capaian RO pada satuan kerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

RO	VOLUME		RVRO/TVRO	Capaian RO per satker
	Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	85%	85%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	85%	85%	100%	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	85%	85%	100%	
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	BB	BB	100%	

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan :

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh perhitungan penyerapan anggaran pada satuan kerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

$$AA = 18.049.118.382$$

$$RA = 17.131.633.783$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{RA}{AA} \times 100\% \\
 &= \frac{17.131.633.783}{18.049.118.382} \times 100\% \\
 &= \mathbf{94,92\%}
 \end{aligned}$$

c. Efisiensi RO Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengukuran di tingkat RO dalam hal data realisasi anggaran RO menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^m \left[\left[AARoi \times CROi \right] - RARoi \right]}{\sum_{i=1}^n \left[AAKROi \right]} \times 100\%$$

Keterangan :

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AARO_i$: alokasi anggaran RO i
 $RARO_i$: realisasi anggaran KRO i
 CRO_i : capaian RO i

RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (2)	(6)=(5) - (4)
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	100%	1.912.699.467	1.703.034.904	1.912.699.467	209.664.563
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	100%	574.951.751	571.498.902	574.951.751	3.452.849
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	100%	3.853.478.621	3.821.871.510	3.853.478.621	31.607.111
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	100%	1.480.000.000	1.439.018.929	1.480.000.000	40.981.071
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100%	10.227.988.543	9.596.209.538	10.227.988.543	631.779.005
Jumlah		18.049.118.382	17.131.633.783	18.049.118.382	917.484.599
Efisiensi RO Satuan Kerja $= \frac{\sum((AARO \times CRO) - (RARO))}{\sum(AARO)}$ $(7) = \frac{\sum(6)}{\sum(3)}$				5,08%	

Pengukuran efisiensi RO dengan menggunakan pendekatan perhitungan di tingkat RO, dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran sejak awal tahun anggaran berikutnya setelah tersedia data realisasi anggaran per RO.

Untuk mendapatkan nilai kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian *output*, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi

sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% (seratus persen) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam Nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen). Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi, maka Nilai Efisiensi RO Satuan Kerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya adalah sebesar :

$$NE : 50\% + \left(\frac{5,08\%}{20} \times 50 \right) = 62,70\%$$

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left[\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right]}{n}$$

Keterangan :

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAKn : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDKn : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

Perhitungan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

Bulan	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi per bulan	Konsisten pada bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	507.653.495	223.110.625	43,95%	43,95%
Februari	1.850.711.506	794.372.461	42,92%	43,44%
Maret	3.444.087.144	1.667.688.329	48,42%	45,10%
April	4.631.778.496	3.657.502.642	78,97%	53,56%
Mei	5.693.996.168	4.315.129.878	75,78%	58,01%
Juni	6.459.258.402	5.492.156.499	85,03%	62,51%
Juli	8.101.825.757	6.573.246.254	81,13%	65,17%
Agustus	9.329.564.235	7.830.642.886	83,93%	67,52%
September	9.972.227.176	8.988.258.597	90,13%	70,03%
Oktober	11.039.668.072	9.982.908.434	90,43%	72,07%
November	17.542.511.148	13.055.101.920	74,42%	72,28%
Desember	18.049.118.382	17.131.633.783	94,92%	74,17%

Berdasarkan tabel di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bulan Desember Tahun 2022 pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya adalah sebesar **74,17% (tujuh puluh empat koma satu tujuh persen)**.

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi

Nilai Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implentasi dengan bobot masing-masing variabel pada satuan kerja. Rumusan dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI : (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implemntasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian *Output* Program

CRO : capaian RO

NE : nilai efisiensi satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_k : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian *Output* Program

WCRO : bobot capaian RO

WE : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

WP = 9,7%

Wk = 18,2%

WCOP = WCRO = 43,5%

WE = 28,6%

Nilai Kinerja atas aspek implementasi satuan kerja di atas adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NKI} &= (P \times W_p) + (K \times W_k) + (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{NE} \times W_E) \\ &= (94,92\% \times 9,7\%) + (74,17\% \times 18,2\%) + (100\% \times 43,5\%) + \\ &\quad (62,70\% \times 28,6\%) \\ &= 84,14\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja atas aspek implementasi satuan kerja adalah sebesar **84,14% (delapan puluh empat koma satu empat persen)**, maka nilai Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Satuan Kerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya termasuk **Kategori Baik**.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Mengenai faktor-faktor internal yang berupa kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

a. Analisis Lingkungan Internal

Dasar arahan, dan penekanan terhadap Analisis Lingkungan Internal untuk mendapatkan faktor-faktor dominan yang dapat menjadi kunci keberhasilan program dan pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi ditinjau dari aspek sebagai berikut :

- Kemampuan Kelembagaan/Instansi
- Kondisi Sumber Daya Manusia
- Kondisi Data, Studi dan Informasi
- Kemampuan Dana

- Kemampuan Teknologi Pelayanan

- Organisasi Pelayanan
- Etos Kerja

Dari Aspek tersebut diperoleh faktor-faktor yang dominan yang dapat menjadi kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*)

1. Kejelasan kebijakan tentang status, kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
2. Adanya dukungan dana yang berkesinambungan
3. Perangkat kerja yang memadai

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a) Adanya Kebijakan/Peraturan dari Pusat maupun Provinsi pada tahun berjalan
- b) Mensinergikan antara waktu penyusunan dokumen dan waktu kegiatan-kegiatan rutin dan tambahan tugas dalam satu kurun waktu anggaran
- c) Kapasitas dan kemampuan sumber daya yang terbatas dan tidak merata
- d) Kurangnya ASN untuk tenaga teknis
- e) Terbatasnya kesempatan mengikuti Diklat Teknis

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Dasar arahan dan penekanan terhadap Analisis Lingkungan Eksternal untuk mendapatkan faktor-faktor dominan yang menjadi keberhasilan program dan pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi ditinjau dari aspek sebagai berikut :

- Kesepakatan Global
- Agenda Pemerintah
- RPJMD
- Permasalahan SDA
- Kebijakan Pemerintah, Departemen terkait, Pemerintah Provinsi
- Pendekatan Pembangunan

Dari aspek tersebut diperoleh faktor-faktor yang dominan yang dapat menjadi kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Peluang (*Opportunity*)

- a) Meningkatnya kepercayaan dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah
- b) Adanya komitmen pimpinan terhadap eksistensi Bappedalitbang Kota

Palangka Raya

- c) Adanya Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA

2. Ancaman/Kendala (*Threats*)

- a) Ego sektoral antar unit kerja, yang diakibatkan ketidakmampuan memahami tupoksi masing-masing.
- b) Belum semua hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan
- c) Kurangnya kesadaran/tertib Perangkat Daerah terhadap pentingnya sistem pelayanan komunikasi dan informasi
- d) Kurangnya tenaga terampil dalam menghadapi era informasi teknologi.

Dengan melakukan analisis SWOT akan dapat memahami segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam hal meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. Sehingga ke depan dapat melakukan perencanaan dengan lebih baik sehingga kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat diminimalisir guna percepatan Target RPJMD dan RENSTRA yang telah disusun. Prosentase kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berikut sasaran strategis, indikator kinerja, dan kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Matrik Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
					Target	Capaian	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD Yang Selaras Dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra-Renja 2. Persentase Kelengkapan Data Sesuai SIPD 3. Persentase Capaian Evaluasi	85%	85%	100
		Persentase RENJA Yang Selaras Dengan RENSTRA	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	11	11	100
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	2	100
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	6	100

			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3	3	100
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	100
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	3	100
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66	66	100
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Yang Sesuai Atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/Daerah)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	23	23	100

			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	8	100
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15	15	100
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD Yang Memiliki Perencanaan Baik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan / Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100 %	85	85	100
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	23	23	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100

			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7	4	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	100
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7	4	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100

			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12	12	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	100

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15	15	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100

			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	100

	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang Yang Termanfaatkan	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan / Jumlah Penelitian dan Pengembangan x 100%	100	100	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	100
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	1	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	100
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3	3	100
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	2	2	100

			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	1	1	100
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5	5	100
			Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	100
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	3	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti	100	100	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53	53	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	13	100

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35	35	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29	29	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	2	2	100
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD`	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	29	29	29
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	2	100

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	22	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	36	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28	28	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	41	41	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	16	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	100
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100

Dari matrik tersebut diatas menunjukkan bahwa semua program/kegiatan yang dilaksanakan, menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator Kinerja sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator Kinerja dimaksud, hal ini karena operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dari pagu anggaran perubahan sebesar **Rp. 18.049.118.382** realisasi sampai 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 17.131.633.783** atau **94,92%** dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6

**Matrik Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sesuai Sasaran Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Progam/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan		
					Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD Yang Selaras Dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra-Renja 2. Persentase Kelengkapan Data Sesuai SIPD 3. Persentase Capaian Evaluasi	2.487.651.218	2.274.533.806	91,43
		Persentase RENJA Yang Selaras Dengan RENSTRA	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	1.191.703.467	995.781.447	83,56
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	647.373.062	505.629.032	78,10

			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	103.301.250	51.341.250	49,70
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	441.029.155	438.811.165	99,50
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	720.996.000	707.253.457	98,09
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	484.621.750	478.668.020	98,77
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	236.374.250	228.585.437	96,70
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Yang Sesuai Atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/ Daerah)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	574.951.751	571.498.902	99,40

			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	176.612.063	174.659.326	98,89
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	398.339.688	396.839.576	99,62
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD Yang Memiliki Perencanaan Baik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan / Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100 %	3.853.478.495	3.821.871.510	99,18
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.756.426.495	1.752.140.612	99,76
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	569.944.125	568.707.780	99,78
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	167.103.750	166.068.450	99,38

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	180.689.062	180.563.911	99,93
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	398.689.558	398.000.506	99,83
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	211.100.000	210.490.506	99,71
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	228.900.000	228.309.459	99,74
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	673.426.813	641.916.106	95,32

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.107.250	73.755.302	99,53
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	460.746.000	446.962.200	97,01
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.483.750	27.825.700	88,38
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.589.813	32.654.364	97,22
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	53.500.000	51.641.240	96,53
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000	17.834.800	89,17

			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.423.625.313	1.419.057.292	99,68
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	177.937.125	175.999.400	98,91
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	266.787.700	266.081.611	99,74
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.190.000	20.929.800	98,77
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	191.730.800	191.498.340	99,88
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	746.150.000	745.263.641	99,88

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.829.688	19.284.500	97,25
	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang Yang Termanfaatkan	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan / Jumlah Penelitian dan Pengembangan x 100%	1.480.000.000	1.439.018.929	97,23
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	169.251.500	153.311.844	90,58
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	169.251.500	153.311.844	90,58
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	108.943.500	101.436.756	93,11
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	108.943.500	101.436.756	93,11
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	881.805.000	869.802.436	98,64

			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	681.805.000	674.963.952	99,00
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	200.000.000	194.396.484	97,42
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	320.000.000	314.467.893	98,27
			Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	148.500.000	147.456.796	99,30
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	61.200.000	58.311.668	95,28
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	110.300.000	108.699.429	98,55
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti	18.049.118.382	17.131.633.783	94,92
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.049.790	103.381.100	93,82
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.252.188	20.226.950	99,88

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.024.789	70.382.000	97,72
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.772.813	12.772.150	99,99
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.887.886.371	6.397.399.324	92,88
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	5.719.326.371	5.289.807.251	92,49
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.006.722.000	953.474.524	94,71
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.375.000	10.374.125	99,99
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD`	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	151.463.000	143.743.424	94,90
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.027.711	216.274.870	95,26

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55.363.000	55.363.000	100
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	171.664.711	160.911.870	93,74
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.225.095.710	2.183.463.247	98,13
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.376.250	11.339.625	99,68
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.855.004.688	1.834.940.893	98,92
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29.768.250	28.862.250	96,96
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44.966.875	44.966.800	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.979.647	263.353.679	92,74
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.780.873	243.856.714	81,34
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	204.633.587	148.862.402	72,75

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92.147.286	91.994.312	99,83
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.148.088	451.834.283	93,52
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	215.108.000	192.424.900	89,46
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.650.000	24.150.000	78,79
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	43.290.088	43.204.500	99,80
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	194.100.000	192.054.883	98,95

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 18.049.118.382 realisasi sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.131.633.783 atau 94,92% yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 16 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai target Rp 5.933.046.371 dengan realisasi sebesar Rp. 5.481.087.251 atau 92,38%.
2. Belanja Barang dan Jasa target Rp. 10.085.161.073 dengan realisasi sebesar Rp. 9.640.499.669 atau 95,59%.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.878.910.938 dengan realisasi sebesar Rp. 1.858.855.288 atau 98,93%.
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 152.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 151.191.575 atau 99,47%.

Penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan tahapan dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama Tahun 2022. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian 100%.

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah realisasi sebesar 100%.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD realisasi sebesar 100%.
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah sebesar 100%.
4. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan realisasi sebesar 100%.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sangat bergantung atas optimalnya dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta ditunjang dengan penggunaan aplikasi secara efektif. Untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi serta kerjasama dari semua pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4.2. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya datang kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja.
4. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Palangka Raya, 26 Januari 2023

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020